

CASCADING

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA

MEWUJUDKAN KOTA PROBOLINGGO YANG TANGGUH, BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, MODERN DAN ADAPTIF

VISI
RPJMD

1. Akselerasi Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pemajuan Kebudayaan
2. Ekonomi Inklusif berbasis Potensi Lokal Daerah yang didukung Integrasi Ekonomi Digital

MISI
RPJMD

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan serta Pelestarian Kebudayaan
2. Akselerasi Pengembangan Ekonomi Berbasis Sektoral

TUJUAN RPJMD

1. Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesenjangan Gender
2. Tenaga Kerja yang Kompeten dan Berdaya Saing
3. Peningkatan Nilai Tambah dan Produktivitas Sektor

SASARAN RPJMD

1. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI MELALUI OPTIMALISASI POTENSI UNGGULAN DAERAH
Indikator : **Pertumbuhan Ekonomi**
2. MENURUNKAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN
Indikator : **Prosentase Penduduk miskin**

TUJUAN
DISPERINAKER

1. Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja
Indikator : - **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPKA)**
- **Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**
2. Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri
Indikator : **Persentase Peningkatan Nilai Produksi sektor industri**
3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
Indikator : **Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Disperinnaker)**

SASARAN
DISPERINAKER

PROGRAM ,KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INDIKATOR

Urusan Ketenaga Kerjaan

Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas

Indikator : Persentase Pencari Kerja dan tenaga kerja yang mendapatkan fasilitasi pelatihan dan peningkatan produktivitas

Kegiatan :

Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kopetensi

Indikator : Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi pelatihan berbasis kopetensi

Sub Kegiatan

1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan Kloter Kopertensi

Indikator : Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kopetensi pada tahun n

2. Koordinasi lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan Prasarana Lembaga pelatihan

Indikator : Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktifitas pada tahun n

Program Perencanaan Tenaga Kerja

Indikator : Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja

Kegiatan : Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

Indikator : Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

Indikator : Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro

Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator : Prosentase Pencari Kerja yang mendapatkan fasilitasi pelayanan antar kerja

- 1 **Kegiatan :** Pelayanan antar kerja di daerah Kab/kota

Indikator : Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan fasilitasi pelayanan antar kerja

Sub Kegiatan

- Perluasan Kesempatan kerja
Indikator : Jumlah Tenaga Kerja yang di berdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja
- Penyelenggaraan unit pelayanan Disabilitas ketenaga kerjaan
Indikator : Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD

2 Kegiatan: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Indikator : Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan fasilitasi informasi pasar kerja

Sub Kegiatan

JOB FAIR/ Bursa Kerja

Indikator : Jumlah Pecarii Kerja melalui Job Fair/Bursa Kerja

Program Hubungan Industrial

Indikator : Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja

1. Kegiatan : Pengesahan peraturan

Perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja

Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kab/kota

Indikator : Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan

Sub Kegiatan

Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan

Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

Indikator : Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengembangan hubungan industrial

2. Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : Persentase kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan anjuran dan perjanjian bersama

Sub Kegiatan : Pencegahan Perselisihan

Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan

Penutupan Perusahaan yang

Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1

(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator : Jumlah dokumen mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial

**PROGRAM ,KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN
INDIKATOR**

Urusan Perindustrian

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Indikator : Persentase Kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan industri yang difasilitasi

Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Indikator : Persentase Rencana Pembangunan Industri yang dilaksanakan

Sub Kegiatan

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Indikator : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

4. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Indikator : Jumlah dokumen Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri

Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Indikator : Persentase Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan sesuai ketentuan

Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator : Persentase Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan sesuai ketentuan

Sub Kegiatan

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota

Indikator : Persentase Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan sesuai ketentuan

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Indikator : Persentase Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini

Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator : Persentase Data Industri yang dikelola dengan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)

Sub Kegiatan

Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota

Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Indikator : Persentase Data Industri yang dikelola dengan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)